



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
TAHUN 2023**



KABUPATEN JEMBRANA

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**, sedangkan OPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional OPD dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
 - Undang-undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 66).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah

Dalam Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana.

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana.
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan

Bab III : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana.

- 3.1 Pos-pos laporan keuangan daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana.
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja dan Transfer
 - 3.1.3 Penerimaan Pembiayaan
 - 3.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
- 3.2 Pos-pos Laporan Operasional
 - 3.2.1 Pendapatan –LO
 - 3.2.2 Beban
 - 3.2.3 Surplus Non Operasional
 - 3.2.4 Defisit Non Operasional
- 3.3 Pos-pos Neraca
 - 3.3.1 Aset
 - 3.3.2 Kewajiban
 - 3.3.3 Ekuitas
- 3.4 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4 Informasi penting lainnya

Bab IV : Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab V : Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana.

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan anggaran 2023, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Daerah Pemerintah Kecamatan Jembrana adalah sebagai berikut :

- Belanja Operasi terealisasi sebesar **Rp. 9.739.489.540,00** atau **93,85 %** dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 10.377.069.512,00** sehingga masih ada tersisa sebesar **Rp. 637.579.972,00** atau **6,15 %**. Belanja Operasi terdiri dari :
 1. Belanja Pegawai jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 6.707.067.702,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.592.477.249,00 atau 98,29 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 114.590.453,00 atau 1,71 %.
 2. Belanja Barang dan jasa jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3.670.001.810,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.147.012.291,00 atau 85,74 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 522.989.519 atau 14,26 %.
- Belanja Modal terealisasi sebesar **Rp. 1.231.723.600,00** atau **99,32 %** dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 1.240.178.600,00** sehingga masih ada tersisa sebesar **Rp. 8.455.000,00** atau **0,68 %**. Belanja Modal terdiri dari :
 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 208.528.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 204.528.600,00 atau 98,08 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 1,92 %.
 2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.031.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.027.195.000,00 atau 99,67 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.455.000,00 atau 0,33 %.

Adapun rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan berdasarkan belanja Daerah untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal adalah sebagai berikut :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 8.351.491.312,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 7.997.849.975,00 atau 95,77%, dengan sisa dana sebesar Rp. 353.641.337,00 atau 4,23%. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 828.650,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 807.200,00 atau 97,41% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 21.450,00 atau 2,59%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 353.450,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 340.000,00 atau 96,19% dengan sisa anggaran sebesar Rp.13.450,00 atau 3,81%.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari pagu anggaran Rp. 231.650,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 227.650,00 atau 98,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.000,00 atau 1,73%.
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 243.550,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 239.550,00 atau 98,36% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.000,00 atau 1,64%.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 6.707.913.502,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 6.593.017.249,00 atau 98,29% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 114.896.253,00 atau 1,71%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari pagu anggaran Rp. 6.707.067.702,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp 6.592.477.249,00 atau 98,29% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 114.590.453,00 atau 1,71%.
 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dari pagu anggaran Rp. 548.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 540.000,00 atau 98,54% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.000,00 atau 1,45%.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari pagu anggaran Rp. 297.800,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 297.800,00 atau 100%.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 75.600.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 75.380.000,00 atau 99,71% dengan sisa anggaran sebesar

Rp. 220.000,00 atau 0,29%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dari pagu anggaran Rp. 75.600.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 75.380.000,00 atau 91,98% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 220.000,00 atau 0,29%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 769.996.750,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 617.926.862,00 atau 80,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 152.069.888,00 atau 19,75%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari pagu anggaran Rp. 14.390.200,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 11.113.300,00 atau 77,23% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.276.900,00 atau 22,77%.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari pagu anggaran Rp. 208.528.600,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 204.528.600,00 atau 98,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 1,92%
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari pagu anggaran Rp. 228.105.300,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 200.398.200,00 atau 87,85% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 27.707.100,00 atau 2,15%.
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari pagu anggaran Rp. 27.946.650,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 25.480.650,00 atau 91,18% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.466.000,00 atau 8,82%.
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan, dari pagu anggaran Rp. 10.514.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 10.384.000,00 atau 98,76% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 130.000,00 atau 13,22%.
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari pagu anggaran Rp. 280.512.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 166.022.112,00 atau 59,19% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 114.489.888,00,00 atau 40,81%.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Desa, dari pagu anggaran Rp. 513.637.610,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 473.313.476,00 atau 92,15% dengan sisa

anggaran sebesar Rp. 40.324.134,00 atau 7,85%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari pagu anggaran Rp. 7.060.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 7.060.000,00 atau 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0%.
 2. Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari pagu anggaran Rp. 172.617.610,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 134.823.476,00 atau 78,11% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.794.134,00 atau 21,89%.
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari pagu anggaran Rp. 333.960.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 331.430.000,00 atau 99,24% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.530.000,00 atau 0,76%.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari pagu anggaran Rp. 283.514.800,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 237.405.188,00 atau 83,74% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 46.109.612,00 atau 16,26%.

Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari pagu anggaran Rp. 33.103.500,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 26.129.850,00 atau 78,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.973.650,00 atau 21,07%.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari pagu anggaran Rp. 184.480.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 154.580.338,00 atau 83,79% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 29.899.662,00 atau 16,21%.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari pagu anggaran Rp. 33.500.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 32.350.000,00 atau 96,57% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.150.000,00 atau 3,43%.
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari pagu anggaran Rp. 179.313.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 14.000.000,00 atau 78,08% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.931.300,00 atau 21,92%.

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari pagu anggaran Rp. 14.400.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 10.345.000,00 atau 71,34% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.155.000,00 atau 29,66%.

2.1.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3.125.855.950,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 2.880.884.315,00 atau 92,16%, dengan sisa dana sebesar Rp. 244.971.635,00 atau 7,84%. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dari pagu anggaran Rp. 96.474.050,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 70.690.712,00 atau 73,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 25.783.338,00 atau 26,73%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dari pagu anggaran Rp. 6.084.350,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 6.084.350,00 atau 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dari pagu anggaran Rp. 90.389.700,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 64.606.362,00 atau 71,48% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 25.783.338,00 atau 9,00%.
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dari pagu anggaran Rp. 3.029.381.900,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 2.810.193.603,00 atau 92,76% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 219.188.297,00 atau 7,24%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dari pagu anggaran Rp. 1.031.650.000,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 1.027.195.000,00 atau 99,57% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.455.000,00 atau 0,43%.
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dari pagu anggaran Rp. 1.997.731.900,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar

Rp. 1.782.998.603,00 atau 89,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 214.733.297,00 atau 10,75%.

2.1.3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 32.838.850,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 5.618.850,00 atau 17,11%, dengan sisa dana sebesar Rp. 27.220.000,00 atau 82,89%. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dari pagu anggaran Rp. 32.838.850,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 5.618.850,00 atau 17,11%, dengan sisa dana sebesar Rp. 27.220.000,00 atau 82,89%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tigas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari pagu anggaran Rp. 32.838.850,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 5.618.850,00 atau 17,11%, dengan sisa dana sebesar Rp. 27.220.0000,00 atau 82,89%.

2.1.4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 105.540.000,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 85.820.000,00 atau 81,32%, dengan sisa dana sebesar Rp. 19.720.000,00 atau 18,68%. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dari pagu anggaran Rp. 105.540.000,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 85.820.000,00 atau 81,32%, dengan sisa dana sebesar Rp. 19.720.000,00 atau 18,68%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhonneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pagu anggaran

Rp. 105.540.000,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 85.820.000,00 atau 81,32%, dengan sisa dana sebesar Rp. 19.720.000,00 atau 18,68%.

2.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.522.000,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 1.040.000,00 atau 68,33%, dengan sisa dana sebesar Rp. 482.000,00 atau 31,67%. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari pagu anggaran Rp. 1.522.000,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 1.040.000,00 atau 68,33%, dengan sisa dana sebesar Rp. 482.000,00 atau 31,67%. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dari pagu anggaran Rp. 1.522.000,00 dengan realisasi pencapaian kinerja mencapai sebesar Rp. 1.040.000,00 atau 68,33%, dengan sisa dana sebesar Rp. 482.000,00 atau 31,67%.

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Jembrana didasari pada penyerapan anggaran dibawah 85%, adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan pencapaian target terjadi pada program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN KETIDAK CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	297.800,00	0,00	0,00	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja Cetak dan fotocopy tidak diralisasikan, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.390.200,00	11.113.300,00	77,23	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk alat listrik, akibat harga satuan yang

					direalisasi jauh lebih rendah dari harga perencanaan, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.512.000,00	166.022.112,00	59,19	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas akibat pembayarannya reel cost sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Desa				
	Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.617.610,00	134.823.476,00	78,11	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja listrik, telpon, internet dan Air akibat realisasi tagihan riil yang tidak dapat diprediksi, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.103.500,00	26.129.850,00	78,93	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja Bahan Bakar Minyak akibat minimnya kegiatan oprasional di lapangan, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.480.000,00	154.580.338,00	83,79	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja Bahan Bakar Minyak akibat minimnya kegiatan oprasional di lapangan, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.931.300,00	14.000.000,00	78,08	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk alat Kebersihan, akibat harga satuan yang direalisasi jauh lebih rendah dari harga perencanaan, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000,00	10.345.000,00	71,34	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk pemeliharaan Peralatan dan mesin, akibat minimnya jumlah peralatan dan mesin yang harus di pelihara, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90.389.700,00	64.606.362,00	71,48	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas akibat pembayarannya reel cost sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tigas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32.838.850,00	5.618.850,00	17,11	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja Honor Narasumber akibat pada DPA tercantum jumlah honor yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, sehingga tidak dapat dilaksanakan.
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM				
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhoneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	105.540.000,00	85.820.000,00	81,32	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja Sewa peralatan dan mesin, akibat tidak terlaksananya kegiatan perlombaan, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.522.000,00	1.040.000,00	68,33	Anggaran yang sekiranya dipergunakan untuk belanja Alat Tulis Kantor, Cetak dan fotocopy akibat harga satuan yang direalisasi jauh lebih rendah dari harga perencanaan, sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Kecamatan Jembrana.

3.1.1 Pendapatan

Di dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kecamatan Jembrana tidak ditargetkan adanya Pendapatan Daerah, sehingga sampai dengan 31 Desember 2023 Realisasi Pendapatan Daerah adalah Rp. 18.000.000,00.

3.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kecamatan Jembrana sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 10.971.213.140,00 atau 94,44% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 646.034.972,00 atau 5,56% dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.617.248.112,00 disediakan dalam APBD.

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi anggaran Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2023 mencapai sebesar **Rp.9.739.489.540,00** atau **93,85%** dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 10.377.069.512,00**. Belanja Operasi bila dirinci terdiri dari :

▪ Belanja Pegawai

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 6.592.477.249,00 atau 98,29% jumlah anggaran yang telah disediakan sebesar Rp. 6.707.067.702,00

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.672.104.000,00	2.621.571.300,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	253.792.600,00	240.496.628,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	206.400.000,00	214.830.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.930.000,00	57.630.000,00

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	142.739.820,00	138.032.520,00
6	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	14.883.745,00	16.998.046,00
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.564,00	33.652,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	208.954.802,00	216.063.535,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.473.038,00	5.401.032,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.419.190,00	16.203.247,00
11	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.794.068.532,00	2.062.077.876,00
12	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	103.434.064,00
13	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	899.705.349,00
JUMLAH		6.378.801.291,00	6.592.477.249,00

▪ Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa realisasinya sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2023 mencapai sebesar Rp.3.147.012.291,00 atau 85,75% jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.670.001.810,00.

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	138.652.899,00	139.656.243,00
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.571.000,00	0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	123.191.200,00	34.500.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	38.885.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.590.700,00	39.506.050,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.140.000,00	7.060.000,00

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.255.000,00	14.730.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	20.294.000,00	11.113.300,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	633.230.500,00	240.799.500,00
10	Belanja Obat-Obatan-Obat	20.000.000,00	0,00
11	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	714.477.000,00	0,00
12	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	66.075.000,00	0,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.669.200,00	33.561.000,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.192.900,00	5.733.300,00
15	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	24.150.000,00	24.360.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	178.395.200,00	97.387.000,00
17	Belanja Pakaian Batik Tradisional	89.459.900,00	145.700.000,00
18	Belanja Pakaian Olahraga	80.070.000,00	44.580.000,00
19	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	71.850.000,00	20.800.000,00
20	Honorarium Penyuluh atau Pendamping	210.000.000,00	0,00
21	Honorarium Rohaniwan	84.000.000,00	8.000.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.000.000,00	69.950.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	318.780.000,00	331.430.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan	951.412.200,00	939.462.400,00

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
	Umum		
25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	118.040.000,00	135.540.000,00
26	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	0,00
27	Belanja Tagihan Telepon	10.266.698,00	12.218.332,00
28	Belanja Tagihan Air	14.092.000,00	10.968.000,00
29	Tagihan Listrik	64.033.366,00	72.100104,00
30	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.370.000,00	10.384.000,00
31	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.042.570,00	39.537.040,00
32	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00
33	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.578.500,00	6.435.400,00
34	Belanja Sewa Excavator	50.000.000,00	0,00
35	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37.400.000,00	0,00
36	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.410.000,00	900.000,00
37	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	0,00	900.000,00
38	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	0,00
39	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat bantu-Pompa	700.000,00	0,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.827.000,00	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.044.000,00	7.000.000,00
43	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	28.000.000,00

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
	Beroda Dua		
44	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.054.000,00	10.975.000,00
45	Belanja Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.250.000,00	2.000.000,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	1.000.000,00	900.000,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	3.000.000,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.500.000,00	11.695.000,00
49	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00
50	Belanja Pemeliharaan alat studio, komunikasi dan pemancar-Alat studio-Peralatan Studio Audio	500.000,00	0,00
51	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.600.000,00	18.000.000,00
52	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.000.000,00	11.000.000,00
53	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	3.665.000,00
54	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	0,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
	Kantor		
55	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	45.165.800,00	0,00
56	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.500.000,00	298.150.322,00
57	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	206.221.600,00	81.430.000,00
58	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	7.000.000,00	7.000.000,00
59	Belanja Jasa Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya	7.000.000,00	50.400.000,00
JUMLAH		4.641.952.224,00	3.147.012.291,00

3.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2023 realisasinya mencapai sebesar Rp 1.231.723.600,00 atau 99,32% dengan dari anggaran yang telah sediakan sebesar Rp. 1.240.178.600,00

NO	URAIAN	REALISASI	
		2022	2023
1	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	13.708.500,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	47.452.500,00
3	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	1.998.000,00
4	Belanja Modal Personal Computer	0,00	125.763.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	0,00	27.694.500,00
6	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	1.620.000,00
7	Belanja Modal Jalan Desa	983.408.417,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.024.464.583,00	1.027.195.000,00
JUMLAH		2.021.581.500,00	1.231.723.600,00

Rasio-Rasio Belanja

- Rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebesar 93,86%
 - Rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 98,29%
 - Rasio belanja barang dan jasa terhadap total belanja adalah sebesar 85,75%
- Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah sebesar 99,32%

Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Jembrana sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran Semula (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$
Belanja Daerah	11.754.578.570,00	11.617.248.112,00	10.971.213.140,00	94,44
Belanja Operasi	10.484.748.570,00	10.377.069.512,00	9.739.489.540,00	93,86
Belanja Modal	1.269.830.000,00	1.240.178.600,00	1.231.723.600,00	99,32
Jumlah :	11.754.578.570,00	11.617.248.112,00	10.971.213.140,00	94,44

Tabel 2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja per 31 Desember tahun 2023 Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023

Kode Rek.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$
5.1.1	Belanja Operasi	10.377.069.512,00	9.739.489.540,00	93,86
5.1.1.1	Belanja Pegawai	6.707.067.702,00	6.592.477.249,00	98,29
5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.670.001.810,00	3.147.012.291,00	85,75
5.2.2	Belanja Modal	1.240.178.600,00	1.231.723.600,00	99,32
Jumlah		11.617.248.112,00	10.971.213.140,00	94,44

3.1.3 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kecamatan Jembrana per 31 Desember tahun anggaran 2023 adalah Rp. 0.00,- (nihil).

3.1.4 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kecamatan Jembrana per 31 Desember tahun anggaran 2023 adalah Rp. 0.00,- (nihil).

3.2 Pos - pos Laporan Operasional

KEGIATAN OPERASIONAL	JUMLAH	
	2023	2022
1. PENDAPATAN	18.000.000,00	0,00
2. BEBAN :	10,899.441.998,00	12.072.906.856,00
a. Beban Pegawai	6.592.477.249,00	6.378.801.291,00
Jumlah Belanja Pegawai Kecamatan Jembrana per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.378.801.291,00		
Terdiri Dari :		
- Beban Gaji Pokok PNS – LO	2.621.571.300,00	2.672.104.000,00
- Beban Tunjangan Keluarga PNS – LO	240.496.628,00	253.792.600,00
- Beban Tunjangan Jabatan PNS – LO	214.830.000,00	206.400.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS – LO	57.630.000,00	63.930.000,00
- Beban Tunjang Beras PNS – LO	138.032.520,00	142.739.820,00
- Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS – LO	16.998.046,00	14.883.745,00
- Beban Pembulatan Gaji PNS – LO	33.652,00	35.564,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS – LO	216.063.535,00	208.954.802,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS – LO	5.401.032,00	5.473.038,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian PNS – LO	16.203.247,00	16.419.190,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja – LO	2.062.077.876,00	2.794.068.532,00
- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	103.434.064,00	0,00
- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	899.705.349,00	0,00

KEGIATAN OPERASIONAL	JUMLAH	
	2023	2022
<p>b. Beban Pegawai</p> <p>Jumlah Beban Barang dan Jasa Kecamatan Jembrana Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.151.136.591,00</p> <p>Terdiri Dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beban Persediaan 877.571.693,00 - Beban Jasa 1.736.625.276,00 - Beban Pemeliharaan 95.835.000,00 - Beban Perjalanan Dinas 379.580.322,00 	3.151.136.591,00	4.642.055.324,00
<p>c. Beban Penyusutan dan amortisasi</p> <p>Jumlah beban penyusutan pada Kecamatan Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.155.828.158,00</p> <p>Terdiri Dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 147.007.911,00 - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 137.252.331,00 - Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 871.567.916,00 	1.155.828.158,00	1.052.050.241,00
<p>JUMLAH BEBAN :</p> <p>surplus /deficit dari operasional sebesar (10.881.441.998,00)</p>	10.881.441.998,00	12.072.906.856,00
<p>3. SURPLUS /DEFISIT NON OPERASIONAL</p> <p>Pada Kantor Kecamatan Jembrana nilai surplus / defisit non operasional 0,00.</p>		

3.3 Pos-pos Neraca

3.3.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satu uang.

Aset, per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kecamatan Jembrana sesuai dengan yang tertera dalam SIMDA adalah sebesar :

Aset terdiri atas :

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerima	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00
Kas BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.289.600,00	907.300,00
Terdiri Dari :		
- Persediaan alat tulis kantor	29.600,00	907.300,00
- Persediaan Kertas dan Cover	1.260.000,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.289.600,00	907.300,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Kepada entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
ASET TETAP		
Tanah	3.337.374.600,00	3.398.124.600,00
<i>Terdapat transaksi berkurang berupa Pengalihan status Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/Perusahaan senilai (Rp.60.750.000,00)</i>		
Peralatan dan Mesin	2.279.216.790,00	2.126.377.790,00
Alat Berat	0,00	0,00
Alat Angkutan	795.937.500,00	843.120.500,00
<i>Terdapat transaksi berkurang berupa Pemindahtanganan Alat Angkutan kendaraan bermotor roda dua senilai (Rp.47.183.000,000)</i>		
Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00
Alat Pertanian/ Peternakan	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	750.490.340,00	703,925.840,00
<i>Terdapat transaksi bertambah berupa Belanja Modal Alat Pendingin senilai Rp.47.452.500,00.</i>		
<i>Terdapat transaksi berkurang berupa Reklas ke Aset Ekstra dari Alat Pendingin senilai (Rp.888.000,00).</i>		
Alat Studio, Komunikasi	24.961.450,00	24.961.450,00
<i>Terdapat transaksi bertambah berupa Belanja Modal Alat Komunikasi lainnya senilai Rp. 1.998.000,00.</i>		
<i>Terdapat transaksi berkurang berupa Reklas ke Aset Ekstra dari Alat Komunikasi lainnya senilai (Rp.1.998.000,00).</i>		
Alat Kedokteran	0,00	0,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00
Komputer	693.827.500,00	540.370.000,00
<i>Terdapat transaksi bertambah berupa Belanja Modal Personal Komputer, Peralatan Personal Komputer, dan Peralatan Komputer Lainnya senilai Rp.155.078.100,00.</i>		
<i>Terdapat transaksi berkurang berupa Reklas ke Aset Ekstra dari Peralatan Komputer lainnya senilai (Rp.1.620.600,00)</i>		
Peralatan Olahraga	14.000.000,00	14.000.000,00
Gedung dan Bangunan	6.800.223.268,00	6.883.414.268,00
<i>Terdapat transaksi berkurang berupa Pengalihan status Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar senilai (Rp.83.191.000,00)</i>		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.641.433.907,00	8.614.238.907,00
Jalan dan Jembatan	4.215.787.047,00	4.215.787.047,00

URAIAN	2023	2022
Bangunan air atau irigrasi <i>Terdapat penambahan dari belanja modal bangunan air kotor lainnya senilai Rp.1.027.195.000,00.</i> <i>Terdapat transaksi bertambah berupa Reklas dari aset tetap bangunan air Kotor lainnya senilai Rp. 1.027.195.000,00.</i> <i>Terdapat transaksi berkurang berupa Reklas ke aset tetap bangunan pembuang pengaman Sungai senilai (Rp. 1.027.195.000,00)</i>	5.057.245.660,00	4.030.050.660,00
Instalasi	143.851.200,00	143.851.200,00
Jaringan	224.550.000,00	224.550.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.540.413.984,00)	(5.467.956.911,00)
AP – Peralatan dan Mesin <i>Terdapat transaksi bertambah dari beban penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp.147.007.911,00) dan transaksi berkurang berupa Pemindahtanganan Peralatan dan mesin senilai Rp.47.183.000,00</i>	(1.973.642.247,00)	(1.873.817.336,00)
AP – Gedung dan Bangunan <i>Terdapat transaksi bertambah dari beban penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp.137.252.331,00) dan transaksi berkurang berupa Penghapusan Status Gedung dan Bangunan senilai Rp.36.188.085,00</i>	(1.966.561.063,00)	(1.865.495.817,00)
AP – Jalan, Irigasi dan Jaringan <i>Terdapat transaksi bertambah dari beban penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan senilai (Rp.871.567.916,00)</i>	(2.600.210.674,00)	(1.728.642.758,00)
JUMLAH ASET TETAP	15.517.834.581,00	15.554.198.654,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset tidak berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	15.519.124.181,00	15.555.105.954,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	15.519.124.181,00	15.555.105.954,00
JUMLAH KEWAJIBAN DANA EKUITAS DANA	15.519.124.181,00	15.555.105.954,00

3.3.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pada Pemerintah Kecamatan Jembrana pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 0,00

3.3.3 Ekuitas

Ekuitas Kecamatan Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.734.874.181,-

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Kecamatan Jembrana yaitu selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2023 AKRUAL	2022 AKRUAL
EKUITAS	15.734.874.181,00	15.555.105.954,00
KEWAJIBAN dan EKUITAS	15.734.874.181,00	15.555.105.954,00

3.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari atas :

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	15.555.105.954,00	14.369.927.795,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.881.441.998,00)	(12.072.906.856,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00

Koreksi Ekuitas Aset Tetap	(107.752.915,00)	215.750.000,00
Koreksi Ekuitas Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Kewajiban	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.953.213.140,00	13.042.335.015,00
EKUITAS AKHIR	15.519.124.181,00	15.555.105.954,00

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp. 15.555.105.954,00 diperoleh dari ekuitas akhir tahun 2022 yang dimutasi menjadi ekuitas awal di tahun 2023.
- b. Surplus/ deficit LO sebesar (Rp. 10,899.441.998,00) diperoleh dari surplus/ deficit Laporan Operasional tahun 2023.
- c. Koreksi ekuitas aset tetap sebesar Rp. 215.750.000,00 diperoleh dari mutasi aset tetap dan Akumulasi Penyusutan.
- d. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 10.953.213.140,00 merupakan total realisasi belanja pada Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 10.953.213.140,00.

3.5 Pengungkapan Atas Pos – Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Etintas Akuntansi atau Pelaporan Menggunakan Basis Akrual Pada Kecamatan Jembrana.

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Total Aset Lancar pada Kecamatan Jembrana per 31 Desember Tahun 2023 Rp.1.289.600,00.

2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Total Aset tetap pada Kecamatan Jembrana per 31 Desember Tahun 2023 Rp.15.517.834.581,00.

3. Aset lainnya

Aset lainnya merupakan kelompok asset yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya yang dimiliki oleh Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana.

Total Aset lainnya pada Kecamatan Jembrana per 31 Desember Tahun 2023 Rp.0.00.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Total Kewajiban pada Kecamatan Jembrana per 31 Desember Tahun 2023 Rp.0,00.

5. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pada Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana,

Total ekuitas pada Kecamatan Jembrana per 31 Desember Tahun 2022 Rp.15.519.124.181,00.

Jumlah Aset yang tercatat dalam Neraca adalah merupakan perolehan Tahun 2023, hal ini disebabkan masih terjadi pencatatan/pendataan Aset yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga Neraca yang disampaikan adalah Neraca yang bersifat sementara.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH KECAMATAN JEMBRANA
KABUPATEN JEMBRANA

4.1 Jumlah belanja APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 pada Pemerintah Kecamatan Jembrana meliputi :

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 828.650,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 353.450,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari pagu anggaran Rp. 231.650,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 243.550,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 6.707.913.502,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari pagu anggaran Rp. 6.707.067.702,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dari pagu anggaran Rp. 548.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari pagu anggaran Rp. 297.800,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 75.600.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dari pagu anggaran Rp. 75.600.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari pagu anggaran Rp. 769.996.750,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari pagu anggaran Rp. 14.390.200,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari pagu anggaran Rp. 208.528.600,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari pagu anggaran Rp. 228.105.300,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari pagu anggaran Rp. 27.946.650,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan, dari pagu anggaran Rp. 10.514.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari pagu anggaran Rp. 280.512.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Desa, dari pagu anggaran Rp. 513.637.610,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari pagu anggaran Rp. 7.060.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 2. Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari pagu anggaran Rp. 172.617.610,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari pagu anggaran Rp. 333.960.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari pagu anggaran Rp. 283.514.800,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari pagu anggaran Rp. 33.103.500,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari pagu anggaran Rp. 184.480.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari pagu anggaran Rp. 33.500.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari pagu anggaran Rp. 17.931.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari pagu anggaran Rp. 14.500.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.

4.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dari pagu anggaran Rp. 96.474.050,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dari pagu anggaran Rp. 6.084.350,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dari pagu anggaran Rp. 90.389.700,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dari pagu anggaran Rp. 3.029.381.900,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dari pagu anggaran Rp. 1.031.650.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dari pagu anggaran Rp. 1.997.731.900,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.

4.1.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dari pagu anggaran Rp. 32.838.850,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari pagu anggaran Rp. 32.838.850,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.

4.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dari pagu anggaran Rp. 105.540.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023. Dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhonneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pagu anggaran Rp. 105.540.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.

4.1.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dari pagu anggaran Rp. 1.522.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.
 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dari pagu anggaran Rp. 1.522.000,00 Sampai dengan per 31 Desember 2023.

BAB V
PENUTUP

Gambaran Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Jembrana per 31 Desember Tahun 2023 secara lebih rinci kami sajikan dalam Laporan Realisasi per 31 Desember Tahun 2023 APBD Tahun 2023, dan Neraca per 31 Desember 2023.

Demikian gambaran atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kecamatan Jembrana Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan sebagai pertanggung jawaban dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Camat Jembrana

Kadek Agus Arianta, SSTP., M.Si
NIP. 19790808 199711 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Laporan Keuangan Kecamatan Jembrana yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (C) Catatan atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jembrana, 31 Desember 2023
Camat Jembrana

Kadek Agus Arianta, SSTP., M.Si
NIP. 19790808 199711 1 001